

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang, memfokuskan diri dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menuju ke arah yang lebih baik. Berbagai jenis dan bentuk usaha baik yang berskala besar maupun berskala kecil dituntut agar lebih maju dan dapat bertahan di tengah era globalisasi saat ini. Salah satu bentuk usaha yang memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bentuk usaha ini merupakan bentuk usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok serta tidak memerlukan modal yang besar (Pransiska, 2018).

Pertumbuhan UMKM saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada ekonomi Indonesia. UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016:ix). Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam menyumbang nilai yang cukup tinggi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2018) menunjukkan pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 2,02% yaitu berjumlah 1.271.440 unit UMKM. Kenaikan tersebut juga berdampak positif terhadap PDB Indonesia yang bertumbuh sebesar 9,64% atau Rp. 753.612,8 Milyar.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa UMKM merupakan bentuk usaha yang banyak diminati di Indonesia dan memiliki perkembangan yang konsisten. Namun, UMKM seringkali memiliki kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kesulitan yang dihadapi para pengelola UMKM salah satunya adalah terkendala dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagian besar UMKM yang ada saat ini tidak melakukan pencatatan sesuai standar yang dianjurkan atas kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Banyak di antara pelaku UMKM yang tidak memahami kaidah-kaidah akuntansi yang benar dalam penyajian laporan keuangan, serta tidak tertib dalam mencatat transaksi keuangan dan melakukan pembukuan (Pransiska, 2018).

Pemerintah dalam usahanya meningkatkan dan mengembangkan UMKM telah mengeluarkan suatu standar yang dapat mempermudah para pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangannya. Standar yang dimaksud adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan minimum yang harus disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan SAK EMKM terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016:8). Manfaat dari penggunaan standar yang sudah ditetapkan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik bagi investor atau kreditor, serta wujud pertanggungjawaban manajemen atas pekerjaan yang dilakukan. Penyusunan SAK EMKM ini juga dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari pemerintah sehingga UMKM dapat semakin berkembang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlaila (2018) tentang Penerapan SAK EMKM pada UMKM Sukma Cipta *Ceramic* Dinoyo di Malang menjelaskan bahwa pemahaman pemilik usaha terhadap SAK EMKM masih rendah dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas. Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan di UMKM tersebut masih tergolong sangat sederhana karena dilakukan sesuai dengan pemahaman sendiri tanpa adanya pemakaian suatu standar.

Penelitian ini dilakukan di UMKM *Custom* Kekinian. *Custom* Kekinian merupakan sebuah entitas yang melakukan kegiatan usahanya di bidang perdagangan pakaian non formal dan sablon pakaian. *Custom* Kekinian hingga sekarang memiliki perkembangan yang cukup signifikan baik dari segi produk maupun pangsa pasar. Namun, perkembangan tersebut tidak diiringi dengan sistem penyusunan dan pembukuan laporan keuangan secara wajar. Pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan di *Custom* Kekinian masih sangat sederhana. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap standar yang harus digunakan oleh UMKM yaitu SAK EMKM. Kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu juga mengambil peran terhadap tidak diterapkannya standar yang seharusnya digunakan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan SAK EMKM Pada UMKM *Custom* Kekinian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan SAK pada UMKM *Custom* Kekinian yang sesuai dengan SAK EMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran proses pencatatan, pembukuan, penyusunan serta penyajian laporan keuangan *Custom* Kekinian yang sesuai dengan SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai wadah implementasi dari ilmu yang didapat selama menjalani perkuliahan dan menambah wawasan bagi penulis dalam proses penerapan SAK EMKM pada UMKM *Custom* Kekinian.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi masyarakat khususnya para pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi UMKM *Custom* Kekinian

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk diaplikasikan sebagai panduan dalam pembuatan pembukuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Batasan ruang lingkup bertujuan agar masalah yang dikaji oleh penulis tidak menyimpang dari topik yang telah ditetapkan sebelumnya. Ruang lingkup penelitian ini yaitu proses pencatatan transaksi, pembukuan akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk satu periode tertentu.

